



BADAN PENGARAH PERCEPATAN  
PEMBANGUNAN OTONOMI KHUSUS  
PAPUA

# LAPORAN BULANAN JUNI 2025

“ Percepatan Pembangunan  
Otonomi Khusus Untuk Papua  
Mandiri, Adil, dan Sejahtera “

**Dibuat Oleh:**

Kelompok Kerja  
BP3OKP Papua





## **Ringkasan Eksekutif**

Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis sepanjang Juni 2025 dalam rangka mempercepat implementasi Otonomi Khusus (Otsus) dan memperkuat tata kelola pembangunan di Tanah Papua. Kegiatan ini meliputi audiensi dengan kementerian/lembaga pusat seperti Kemenkeu, KemenHAM, KPK, dan Kemendagri, serta kunjungan kerja langsung ke Kabupaten Keerom. Fokus utama kegiatan meliputi lima klaster prioritas: Papua Cerdas (pendidikan), Papua Sehat (kesehatan), Papua Produktif (ekonomi), Papua Polhukam (politik dan keamanan), serta penguatan sistem kelembagaan. Pendekatan ini mencerminkan peran aktif BP3OKP sebagai simpul koordinasi antara pusat dan daerah untuk memastikan bahwa pembangunan berbasis Otsus benar-benar menjawab kebutuhan Orang Asli Papua (OAP).

Dari hasil kegiatan tersebut, ditemukan sejumlah persoalan mendesak. Di sektor pendidikan, masih terdapat anak putus sekolah, kurangnya sarana, serta penyaluran tunjangan guru daerah 3T yang tidak tepat sasaran. Pada sektor kesehatan, RSUD dan Puskesmas di Keerom mengalami kekurangan obat, minim fasilitas, dan tidak merata pemberian insentif bagi tenaga medis. Prevalensi stunting dan penyakit menular seperti HIV/AIDS, TBC, dan malaria masih tinggi dan memerlukan intervensi kebijakan yang serius. Di sektor ekonomi, program strategis seperti Food Estate dan PSR (Peremajaan Sawit Rakyat) belum berjalan optimal, dan tata kelola Dana Otsus masih menghadapi kendala perencanaan dan pelaporan. Dari sisi politik dan hukum, masih diperlukan penguatan peran lembaga adat, pengawasan tambang ilegal, serta perlindungan hak ulayat.

Sebagai respons atas kondisi tersebut, BP3OKP merekomendasikan penguatan sistem informasi keuangan, penyusunan regulasi daerah terkait Dana Otsus, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pemberdayaan institusi adat serta keagamaan. Diperlukan pula sinkronisasi lintas sektor dan peningkatan kapasitas SDM lokal agar tata kelola Otsus menjadi lebih efektif, transparan, dan berdampak langsung. BP3OKP berharap rekomendasi yang dihasilkan dapat ditindaklanjuti seluruh pemangku kepentingan sebagai upaya bersama dalam meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat Papua, khususnya OAP.



**ALBERTH YOKU, S.Ag**  
**Anggota BPP RI Provinsi Papua**



## 1. Kegiatan Strategis

Anggota Badan dan Kelompok Kerja (Pokja) BP3OKP telah melaksanakan kegiatan-kegiatan strategis sebagai berikut :

### a. Anggota Badan

No	Kegiatan Strategis	Waktu	Tujuan	Hasil
1	RAKOR Interopobalitas Sistem Informasi Pengelolaan Dana Otsus (DJPK – Kemenkeu RI)	11 Juni 2025	Optimalisasi Pemanfaatan SIKD-Otsus, SIPPP, dan SIPD	Penguatan Peran Strategis BP3OKP dalam Pemanfaatan Sistem Informasi
2	Audiensi : KEMENHAM	12 Juni 2025	Koordinasi Terkait Permasalahan HAM yang terjadi di Papua dan Progres Penyelesaian	Mendapat penjelasan terkait kondisi penegakan HAM di Papua
3	Audiensi : KPK	13 Juni 2025	Koordinasi terkait Pencegahan Korupsi, Pelayanan Publik, Pengawasan APIP, dan Manajemen ASN	Mendapatkan penjelasan terkait Tindakan strategis pencegahan & penanganan Korupsi di Papua
4	Audiensi : DJPb	20 Juni 2025	Koordinasi Kebijakan-Sinkronisasi Anggaran, Tata Kelola Keuangan, monitoring anggaran, bimbingan teknis SDM, dan percepatan pembangunan Papua	Mendapatkan penjelasan Status penyaluran Dana Otsus dan Perkembangan Pengelolaan Keuangan di Pemerintah Daerah
5	Audiensi : KEMENKOP	20 Juni 2025	Perkembangan Koperasi Merah Putih dalam mengembangkan Ekonomi berbasis kultur	Mendapatkan penjelasan terkait pengelolaan Koperasi Merah putih di Papua
6	Rapat Koordinasi : WAMENDAGRI RI	24 Juni 2025	Koordinasi Terkait Tata Kelola Sistem Keuangan (SIKD, SIPD, & SIPPP), penguatan peran BP3OKP, & Implementasi UU 2/2021/ Otsus Papua	Peningkatan alur koordinasi antara KEMENDAGRI dan BP3OKP

### b. Kelompok Kerja (Pokja)

#### i. Umum

No	Kegiatan Strategis	Waktu	Tujuan	Hasil
1	Bertemu Wakil Bupati Kab. Keerom	10 Juni 2025	Mendapatkan Informasi tentang Kondisi Umum Kabupaten Keerom	Food Estate Terbengkalai, Ketimpangan Pembangunan Antara Arso Kota dan Sekitarnya, Keterlambatan Penyaluran Dana Otsus



2	Rakor Bersama Muspida Kab. Keerom	11 Juni 2025	Mendapatkan Informasi tentang Pengelolaan Dana TKD & tantangan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dampak keterlambatan Penyaluran &amp; ketidak integritasnya Sistem Informasi Keuangan dan Pemda</li> <li>• Dilanjutkan dengan Koordinasi Intens dengan OPD Terkait</li> </ul>
3	Bertemu Kepala-Kepala Kampung di Distrik Senggi	12 Juni 2025	Mendapatkan Informasi tentang Pendidikan, Kesehatan, & Perekonomian bagi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan Tambang Rakyat yang tidak terkontrol oleh Pemda (Intervensi Pihak Keamanan)</li> <li>• Output Dana Otsus perlu diperjelas dengan label &amp; bentuk yang punya asas manfaat</li> </ul>

**ii. Papua Sehat**

No	Kegiatan Strategis	Waktu	Tujuan	Hasil
1	Kunjungan Kerja : Dinas Kesehatan Kab. Keerom	12 Juni 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengetahui Kondisi Pengelolaan Dana Kesehatan</li> <li>• Angka Pravalensi Stunting &amp; AIDS/TB/MALARIA (ATM)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sangat diperlukan adanya dukungan dalam beberapa aspek. Mencakup optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi anggaran.</li> <li>• Data pervelensi stunting tahun 2021 sebesar 16.5%, tahun 2022 sebesar 18.79%, tahun 2023 sebesar 15.9%, dan tahun 2024 sebesar 14.05 %, dan tahun 2025 melihat dari rekapitulasi status gizi balita pada tanggal 26 Mei 2025 sebesar 12.86%.</li> </ul>
2	Kunjungan Kerja : RSUD Kwaingga Kab. Keerom	12 Juni 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengetahui Kondisi Pelayanan &amp; SarPras</li> <li>• Angka Pravalensi Stunting &amp; AIDS/TB/MALARIA (ATM)</li> </ul>	Rumah Sakit juga sangat kekurangan obat-obatan serta insentif para medis tidak ada karna yang dapat hanya insentif untuk dokter spesialis saja.



3	Kunjungan Kerja : Puskesmas Arso Kota	12 Juni 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengetahui Kondisi Pelayanan &amp; SarPras</li> <li>Angka Pravalensi Stunting &amp; AIDS/TB/MALARIA (ATM)</li> </ul>	Kami sangat berharap agar puskesmas perawatan dapat dilengkapi dengan fasilitas mobil jenazah demi mendukung layanan yang lebih optimal bagi masyarakat.
---	---------------------------------------	--------------	---	--

**iii. Papua Cerdas**

No	Kegiatan Strategis	Waktu	Tujuan	Hasil
1	Kunjungan Kerja : Dinas Pendidikan Kab. Keerom	11 Juni 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengetahui Kondisi Pendidikan</li> <li>Kebijakan Pendidikan bagi OAP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anak Putus Sekolah karena pengaruh peran orang tua (Memilih Kembali Ke daerah asal untuk membantu orang tua bekerja)</li> <li>Insentif Tambahan bagi Guru 3T tidak tepat sasaran (Program Kemensos)</li> </ul>
2	Kunjungan Kerja : SMPN 1 Senggi Kab.Keerom	12 Juni 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengetahui Kondisi Sekolah (Sarpras – Pelayanan)</li> <li>Mendengar keluhan guru tentang tunjangan khusus bagi daerah 3T yang tidak diterima</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kepsek melaporkan menggunakan Dana BOS untuk membangun fasilitas toilet yang secara tata Kelola tidak diperbolehkan Dinas</li> <li>Status Kepemilikan tanah yang masih dimiliki pihak perorangan (tanah pribadi-adat)</li> <li>Ruang kelas tidak sesuai dengan rombongan belajar.</li> </ul>

**iv. Papua Produktif**

No	Kegiatan Strategis	Waktu	Tujuan	Hasil
1	Kunjungan Kerja : BAPPEDA Kab. Keerom	11 Juni 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendapatkan informasi dan data serta kendala/hambatan sehubungan dengan realisasi DBH, Dana Otonomi Khusus dan DTI TA 2025</li> <li>Usulan Program TA 2025</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen Laporan realisasi Dana Otonomi Khusus dan DTI TA 2024 akan disampaikan kepada BP3OKP.</li> <li>Dokumen perencanaan proyek-proyek strategis yang terkena dampak efisiensi.</li> </ul>



2	Kunjungan Kerja : Dinas PUPR Kab. Keerom	11 Juni 2025	Untuk memastikan segi perencanaan, pengawalan, pelaksanaan dan evaluasi DTI, Dana Otonomi Khusus dan DBA TA 2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dokumen Laporan Tahunan Realisasi Dana Otsus, DTI TA 2024</li><li>• Mohon dibantu dokumen perencanaan dan penggunaan Anggaran TA 2025.</li></ul>
3	Kunjungan Kerja : Dinas Pertanian Kab. Keerom	11 Juni 2025	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mendapat informasi terkait laporan realisasi dana Otsus, DTI dan DBH TA 2024.</li><li>• untuk memberikan keterangan dan dokumen :<ul style="list-style-type: none"><li>○ Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran DTI, Dana Otsus dan DBH TA 2024</li><li>○ Program Strategi Nasional (Food Estate)</li><li>○ Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)</li><li>○ Program Replanting.</li></ul></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tindak lanjut Rencana Induk Food Estate di Kabupaten Keerom Tahun 2025 - 2029</li><li>• Bersama APKASINDO Papua, Pemerintah Kabupaten Keerom kesepakatan tindak lanjut PSR</li><li>• Bersma Pemerintah Kabupaten Keerom meninjau Kembali Ijin Perkebunan Sawit PT PN II dan PT Tandan Sawita Perkasa</li></ul>
4	RDP Bersama Klasis GKI Keerom	17 Juni 2025	Mendapatkan informasi tentang usaha peningkatan ekonomi yang dijalankan oleh Klasis GKI Keerom.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Klasis GKI Keerom dalam upaya peningkatan ekonomi yang ada :<ul style="list-style-type: none"><li>○ Koperasi</li><li>○ Lahan Sawit 1 Ha</li><li>○ 16 Ternak Sapi</li></ul></li><li>• Telah melakukan PKS dengan Universitas Ottow&amp;Geisler Jayapura untuk Renstra Ekonomi dan Pengembangan Usahan Ekonomi Berbasis Masyarakat.</li></ul>



**v. Papua Polhukam**

No	Kegiatan Strategis	Waktu	Tujuan	Hasil
1	Kunjungan Kerja : DPR Kab. Keerom	11 Juni 2025	Persentase OAP di DPR Keerom dan langkah penyaluran Dana Otsus khusus bagi OAP perlu diketahui jelas.	Dana Otsus belum maksimal dinikmati OAP, dan DPRK jalur pengangkatan belum optimal menjalankan tugas demi keadilan bagi OAP.
2	Kunjungan Kerja : POLRES Kab. Keerom	11 Juni 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data situasi keamanan dan ketertiban Kabupaten Keerom saat ini.</li> <li>• Data kasus kriminal menonjol dan proses penyelesaiannya di Keerom.</li> <li>• Progres penyelesaian dana hibah INGKAWA untuk program PSR.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Situasi kamtibmas Keerom menjelang PSU tetap aman dan terkendali.</li> <li>• Kasus kriminal dan hibah PSR butuh permintaan surat resmi.</li> <li>• Informasi terbatas, harus ajukan surat resmi untuk akses data.</li> <li>• Konsolidasi TNI/POLRI tetap solid menjaga keamanan wilayah Keerom.</li> </ul>
3	Kunjungan Kerja : KPU & BAWASLU Kab.Keerom	11 Juni 2025	Koordinasi terkait penyiapan PSU Gubernur Papua	Persiapan berjalan baik dan lancar
4	Kunjungan Kerja : Bertemu Tokoh Masyarakat di Distrik Senggi	12 Juni 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sangat perlu dilakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat adat papua melalui Badan KESBANGPOL dan BPN di kabupaten.</li> <li>• Perlu adanya Pemetaan wilayah adat dan penetapan Hakim Adat melalui DPRD otsus</li> <li>• Proses penyaluran Dana desa harus melalui Mekanisme Pengawasan yang tepat sasaran dan tepat guna.</li> <li>• Perlu di evaluasi secara berkala setiap kegiatan pelayanan publik yang didanai oleh Dana Otsus sehingga penggunaan serta pelaporannya tepat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Libatkan tokoh masyarakat dan agama secara aktif.</li> <li>• Lakukan pertemuan bersama berbagai pihak terkait.</li> <li>• Pertemuan dilaksanakan di Kantor Badan Pengarah Otsus.</li> <li>• Jaga kearifan lokal dan sumber daya wilayah adat.</li> <li>• Larang tambang ilegal tanpa masyarakat adat, cegah kerusakan.</li> </ul>
5	Kunjungan Kerja : BAWASLU Prov.Papua & Kota Jayapura	23 Juni 2025	Koordinasi terkait penyiapan PSU Gubernur Papua	Persiapan berjalan baik dan lancar



## **REKOMENDASI**

Berdasarkan Kegiatan Strategis yang dilakukan, anggota dan Kelompok kerja (pokja) memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

### **1. Anggota Badan**

- A. Penguatan Peran BP3OKP:** Dalam pemanfaatan sistem informasi, pengawasan anggaran, hingga penyelesaian isu sosial seperti HAM dan korupsi.
- B. Koordinasi Lintas Sektor:** BP3OKP perlu menjadi simpul koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam implementasi UU Otsus.
- C. Pengembangan Ekonomi Berbasis Kultur:** Pemberdayaan koperasi dan UMKM lokal harus menjadi prioritas dalam kebijakan ekonomi Otsus.
- D. Digitalisasi dan Transparansi:** Diperlukan sistem informasi terpadu dan transparan dalam pengelolaan dana Otsus.

### **2. Kelompok Kerja (Pokja)**

#### **A. Papua Cerdas**

1. Koordinasi dengan kemensos terkait penentuan penerima tunjangan guru daerah 3T
2. Pemenuhan Sarana – Pra sarana pada SMPN 1 Senggi dengan tahapan awal penyelesaian status kepemilikan tanah.

#### **B. Papua Sehat**

1. Peningkatan Akses dan Kualitas dan Layanan Kesehatan
  - Pembangunan RSUD baru kabupaten Keerom.
  - RSUD Kabupaten Keerom harus jadi BLUD
  - Dinkes Keerom membutuhkan fasilitas transportasi darat bagi kepala dinas kesehatan dan kabit- kabit dalam mendukung kebutuhan operasional dinas dalam turun lapangan untuk menjangkau puskesmas – puskesmas.
  - Puskesmas - puskesmas butuh mobil jenazah dan ambulans.
  - RSUD butuh rumah dinas dokter spesialis dan mobil.
  - Peningkatan pelayanan RSUD Kwaingga dengan tambahan Dokter Spesialis Jantung, Dokter Spesialis Kanker, Dokter spesialis Saraf, Dokter spesialis Nefrologi, dan Dokter Anestesi.
2. Penyusunan kebijakan strategis HIV/AIDS, TBC, Malaria, dan Stunting dan langkah-langkah penanggulangan.
3. TPPS memperkuat kualitas pelayanan Kesehatan, sanitasi air bersih dan pengelolaan posyandu yang terkhusus penanganan yang cepat dan tepat terhadap kasus stunting yang sudah ditemukan dan keluarga resiko stunting.

#### **C. Papua Produktif**

1. Perlu disusun Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Dana Otsus di Kabupaten Keerom
2. Sinkronisasi Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah dengan SIPPP, SIPD dan SIKD
3. Memperkuat kapasitas SDM terkait dalam penyusunan dan pengelolaan dokumen perencanaan Otsus Tahunan.
4. Mempercepat peningkatan konektivitas jalan dan jembatan pada proyek strategi nasional Food Estate.
5. Pemanfaatan lahan secara berkelanjutan dengan kearifan local melalui program PSR dan Replanting Kelapa Sawit
6. Meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan, serta pemberdayaan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan.



**D. Papua Polhukam**

1. Meninjau kembali mekanisme dan kebijakan terkait penggunaan Dana desa yang tidak tepat sasaran terutama bagi OAP.
2. Pemeriksaan Izin penggunaan/pemanfaatan Lahan kelapa sawit dari perusahaan-perusahaan yang selama ini beroperasi di kabupaten Keerom.
3. Sangat perlu dilakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat adat papua melalui Badan KESBANGPOL dan BPN di kabupaten.
4. Perlu adanya Pemetaan wilayah adat dan penetapan Hakim Adat melalu DPRD otsus
5. Proses penyaluran Dana desa harus melalui Mekanisme Pengawasan yang tepat sasaran dan tepat guna.
6. Perlu di evaluasi secara berkala setiap kegiatan pelayanan publik yang didanai oleh Dana Otsus sehingga penggunaan serta pelaporannya tepat.
7. Perlu penganan secara terarah dan terpadu serta cepat dalam menangani kegiatan **penambangan ilegal** sehingga mampu memberikan manfaat bagi OAP terutama Masyarakat Hukum adat dalam hak ulayatnya.dan juga melindungi dan melestarikan alam serta kearifan lokal yang ada.
8. Perlu dilakukan Monitoring langsung dalam Tahapan PSU Gubernur Papua



## **Kesimpulan**

1. BP3OKP Provinsi Papua telah aktif menjalankan peran koordinatif dan fasilitatif dalam percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua melalui berbagai kegiatan audiensi, kunjungan kerja, dan rapat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga serta pemerintah daerah.
2. Kegiatan strategis mencakup lima fokus utama: *Papua Cerdas, Papua Sehat, Papua Produktif, & Papua Polhukam*, yang masing-masing menyoroti isu-isu krusial seperti pendidikan OAP, layanan kesehatan, pengelolaan dana Otsus, pemetaan hak ulayat, dan pengawasan tambang ilegal.
3. Temuan lapangan menunjukkan adanya tantangan serius, termasuk keterlambatan dana Otsus, kurangnya sarana-prasarana kesehatan dan pendidikan, ketidaktepatan penyaluran tunjangan guru 3T, ketimpangan pembangunan antar wilayah, dan lemahnya pengawasan terhadap penggunaan dana.
4. Rekomendasi strategis yang dihasilkan menekankan pentingnya penguatan sistem informasi keuangan, sinkronisasi lintas sektor, peningkatan kualitas layanan publik, penyusunan regulasi tata kelola Otsus, serta pemberdayaan masyarakat adat dan institusi keagamaan.

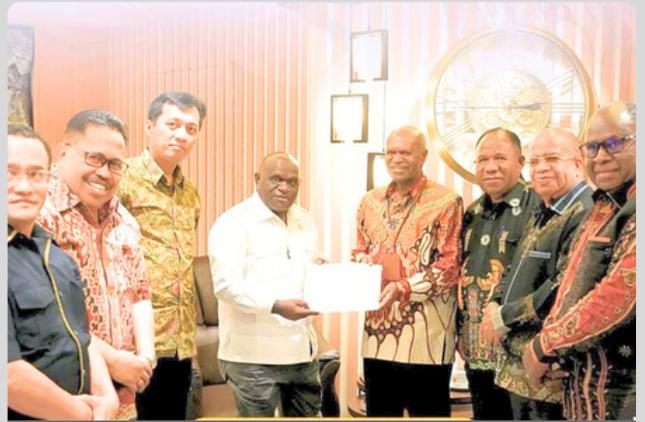
## **Penutup**

Laporan ini mencerminkan komitmen BP3OKP Provinsi Papua dalam mendorong tata kelola Otonomi Khusus yang lebih efektif, transparan, dan partisipatif. Kegiatan yang telah dilakukan menjadi dasar kuat untuk perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran, khususnya dalam menjawab tantangan-tantangan pembangunan dan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP). Diperlukan tindak lanjut nyata dari seluruh pemangku kepentingan agar hasil rekomendasi ini tidak hanya menjadi dokumen, tetapi diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang berdampak langsung di lapangan.

# Dokumentasi Kegiatan BP3OKP Provinsi Papua Periode Juni 2025



Rapat dengan WAMENDAGRI



Audiensi KEMENHAM



Audiensi KEMENKOP



Audiensi DJPB



Kegiatan DJPK



Audiensi KPK



Bertemu Wakil Bupati Kab. Keerom



Pertemuan dengan Muspida



Rapat dengan Bappeda Kab. Keerom



Rapat dengan Dinas Pendidikan Kab.Keerom



Rapat dengan Dinas PUPR Kab. Keerom



Kunjungan Kerja ke RSUD KWAINGGA Kab. Keerom



Kunjungan Kerja ke Puskesmas Arso kota Kab. Keerom



Rapat dengan Dinas kesehatan Kab. Keerom



Bertemu Kepala-kepala Kampung di Distrik Senggi



Bertemu Tokoh Masyarakat di Senggi



Kunjungan ke SMPN 1 Senggi



Kunker : KPU Keerom



Kunker : DPR Kab. Keerom



Kunker BAWASLU KEEROM



Kunker : POLRES Keerom



Monitoring Persiapan PSU di BAWASLU Kota JPR



Monitoring Persiapan PSU di KPU Kota JPR



Monitoring Persiapan PSU di BAWASLU  
Prov. Papua